

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi sehingga dalam menentukan jabatan politik tertentu seperti dalam menentukan arah dan kebijakan negara yang besar diperlukan sebuah proses panjang dikenal dengan sebutan Pemilu (Pemilihan Umum). Pemilihan Umum di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, dilanjut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan terbaru pada tahun 2019.

Dalam proses demokrasi di Indonesia partai politik memiliki peranan penghubung yang strategis antara proses pemerintahan dengan warga negaranya serta memberikan pendidikan politik kepada warga negara atau masyarakat. Dalam sejarah pemilihan umum, eksistensi partai politik Islam di Indonesia memiliki peranan yang tidak dapat diabaikan.

Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat beragama Islam dan memiliki pandangan Islam yang cukup banyak. Banyaknya jumlah pemikiran pandangan Islam tersebut menyebabkan heterogenitas dikalangan umat Islam beragama yang disebabkan karena adanya perbedaan budaya, latar belakang pendidikan, serta benturan sosial. Salah satu partai politik Islam pada masa awal demokrasi sampai dengan saat ini yang masih eksistensi menjalankan peranan tersebut adalah Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Partai PPP berdiri pada tanggal 5 Januari 1973 yang merupakan penggabungan dari empat partai Islam yaitu Partai Nahdatul Ulama (NU) Partai Serikat Islam Indonesai (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan Partai Muslimin Indonesai (Pamusi). Partai PPP yang memiliki asas keislaman dilambangkan dengan gambar ka'bah yang ikut serta menghadapi pemilu pertama pada masa masa orde baru pada tahun 1973.

Dalam perjalanannya, partai PPP pernah meninggalkan asas Islam dan berganti menjadi asas Pancasila, bahkan dilanjutkan dengan penggantian lambang menjadi gambar bintang dan segi lima pada Muktamar I tahun 1984. Kemudian berganti kembali awal dengan asas keislaman dengan lambang Ka'bah setelah Orde Baru tumbang pada Muktamar IV di akhir tahun 1998.

Dalam perjalanan pemilu kerap kali partai politik Islam justru mengalami kekalahan perhitungan suara. Salah satunya terjadi pada partai PPP yang mengalami penurunan perolehan suara pemilihan legislatif pada tahun 2014 dan tahun 2019. Berikut disajikan data yang perolehan suara partai PPP.

Pada tabel tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan total suara sebesar 18.630 dimana pada tahun 2014 Partai PPP mendapat total perolehan suara sebesar 60.164, namun pada tahun 2019 Partai PPP hanya mendapat total perolehan suara sebesar 41.534. Total perolehan suara Partai PPP diperoleh dari penjumlahan Daerah Pemilihan (Dapil) yang terbagi menjadi 6 wilayah yang berbeda dan ditetapkan oleh KPU berbeda setiap tahunnya.

Sebagai contoh Kecamatan Cinere pada tahun 2014 dikelompok dalam Daerah Pemilihan (Dapil) 4 sedangkan pada tahun 2019 dikelompokan dalam Daerah Pemilihan (Dapil) 2. Perolehan suara disetiap Daerah Pemilihan (Dapil) sangat fluktuatif. Pada tahun 2014 dengan total suara sebesar 60.164 diperoleh dari masing masing setiap Dapil. Dapil 1 memperoleh sebanyak 7.508 total suara, kemudian Dapil 2 memperoleh sebanyak 6.855 total suara, Selanjutnya Dapil 3 memperoleh suara terbanyak pada tahun 2014 yaitu sebanyak 21.559.

Kemudian Dapil 4 yang merupakan Daerah Pemilihan terbanyak kedua setelah Dapil 3 pada Tahun 2014 memeproleh suara sebanyak 10.496. Selanjutnya Dapil 5 sebanyak 5.869 suara dan sebanyak 7.877 dipoleh perhitungan suara pada Dapil 6.<sup>1</sup> Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, juga terjadi hal yang sama dengan tahun 2014 dimana setiap Dapil menghasilkan data yang cukup bervariasi. Turunnya suara Partai Persatuan Pembangunan di Depok dipengaruhi juga oleh sistem pemilu yang selalu berubah dari pemilihan umum 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik, lebih sedikit dari pada pemilihan umum 1999 yang diikuti 48 partai politik tidak membuat suara PPP menjadi naik, malah menjadi turun. Turunnya suara PPP dari tahun 1999 yang mendapat 7 kursi menjadi 4 kursi pada pemilu 2004, padahal jumlah peserta pemilu lebih sedikit. Ini karena sistem pemilu yang berubah, yaitu sistem

---

<sup>1</sup> [https://pemilu2014.kpu.go.id/db1\\_dprd2.php](https://pemilu2014.kpu.go.id/db1_dprd2.php), diakses pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 03.14)

pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu proposional setengah terbuka dimana nama caleg dimuat dalam surat suara.

Pada pemilu tahun 2019 sistem pemilu berubah menjadi proporsional terbuka hal ini menyebabkan adanya persaingan yang terjadi bukan hanya antar partai politik tetapi juga persaingan antar sesama kader PPP sendiri. Sehingga menyebabkan fenomena sorotan yang terfokus pada sosok caleg.

Atas dasar tersebut para caleg berlomba mendapatkan dukungan suara pemilih Sistem pemilu proposional terbuka yang mengedepankan sosok figur caleg bukan partai politik dan partai politik hanya sebagai kendaraan politik saja menjadikan persaingan antar kader menjadi tidak sehat, akibatnya kembali lagi pada persoalan politik uang dengan harapan untuk mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya.

Pada Pemilu tahun 2009 PPP tidak mendapatkan kursi sama sekali di DPRD kota Depok. Berbeda pada pemilu tahun 2014 perolehan kursi kembali naik menjadi 4 kursi, namun hal tersebut tidak berlangsung tetap karena pada pemilu tahun 2019 perolehan suara hanya sebanyak 2 kursi.<sup>2</sup> Jika ditarik kebelakang yang lebih jauh lagi, pada tingkat nasional tahun 1977 sampai dengan tahun 1999 Partai PPP pun tetap memperoleh hasil perolehan suara yang sangat fluktuatif.

---

<sup>2</sup> <https://jdih.kpu.go.id/jabar/depok/keputusan-kpuk&halaman-3>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 04.00)

Pada Pemilu tahun 1999 Partai PPP mendapatkan 11.329.905 suara atau sebesar 10,71 persen. Perolehan suara kemudian menurun pada pemilu tahun 2004 dengan 9.248.764 atau 8,14 persen.

Partai PPP senantiasa terlibat konflik internal, salah satunya ketika Mantan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali terjerat kasus korupsi dan mendapatkan vonis hukuman selama 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. Namun hukuman yang diterima oleh Suryadharma Ali meningkat menjadi 10 Tahun penjara dan sekaligus mencabut hak ya untuk dipiuh dalam jabatan pubik selama lima tahun setelah mengajukan proses banding.

Majelis Hakim Tipikor menyatakan bahwa Suryadharma Ali terbukti menyalahkan jabatan sebagai menteri terkait kasus penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2010-2013 ditambah penyalahgunaan dana operasional menteri selanjutnya dalam Muktamar VIII posisi pimpinan parta diisi oleh Romahurmuzy untuk periode 2016-2021.<sup>3</sup> Saat kepemimpinan Romahurmuzy juga muncul konflik kepengurusan dengan kubu Djan Faridz yang juga mengklaim diri sebagai kepengurusan yang sah.

Pada tanggal 12 Juni 2017. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Romahurmuzy lewat putusan PK no.79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016. Terbitnya keputusan tersebut menganulir putusan kasasi no 601 K/Pdt.SusParpol/2015

---

<sup>3</sup> Devita Retno, "Sejarah Partai PPP" (<https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-partai-ppp>), diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 03.39)

tertanggal 2 November 2015 yang memberi kemenangan pada kubu Djan Faridz.

Walaupun demikian, kedua kubu belum melakukan islah, terbukti dengan terjadinya perebutan kantor DPP PPP di jalan Diponegoro, Cikini karta Pusat pada 16 Juli 2017 antara simpatisan kubu Rohahurmuzy yang meminta pihak Djan keluar dari kantor.<sup>4</sup>

Menurut berita harian kompas.com pada tanggal 16 Maret 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Romahurmuzy sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama. Romahurmuzy terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK terkait suap jabatan di Kemenag OTT yang mengamankan uang tunai sebesar RP 156.758.000.

Pada tanggal 1 Mei 2020 Romahurmuzy dinyatakan selesai mengalami penahan hukuman selama 1 tahun penjara di tingkat banding dan dinyatakan bebas.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini yaitu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan perolehan suara Partai PPP dalam Pemilihan Legislatif Kota Depok.

1. Apakah konflik internal memiliki keterkaitan secara langsung atas penurunan perolehan suara PPP di Pileg Kota Depok tahun 2019?

---

<sup>4</sup> ( <https://republika.co.id/berita/oumdlr/putusan-ma-tetapkan-kubu-romi-sebagai-pengurus-sah-ppp>, diakses pada tanggal 10 Februari pada pukul 04.23)

2. apakah terjadi pergeseran pemilih PPP kepada partai politik lain yang berpengaruh terhadap penurunan perolehan suara Partai PPP Tahun 2019?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti memfokuskan penelitian pada 5 faktor penentu penurunan perolehan suara Partai PPP dalam Pemilihan Legislatif antara konflik internal, budaya politik, *money politic*, figur kandidat calon anggota legislative, dan pergeseran perilaku pemilih. Penelitian ini hanya difokuskan pada wilayah kota Depok pada tahun 2019.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang dan pembatasan masalah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik internal DPP PPP mempengaruhi penurunan perolehan suara PPP di Pileg Kota Depok tahun 2019?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan perolehan suara PPP di Kota Depok pada Pemilu 2019?

### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh dampak politik internal terhadap penurunan perolehan suara partai PPP di Kota Depok
2. Menganalisis pengaruh pergeseran perilaku pemilih berpengaruh terhadap perolehan suara Partai PPP Tahun 2019 di Kota Depok

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan dan menambah kajian ilmu politik khususnya dalam menentukan strategi yang dapat diterapkan dalam proses pemilihan umum di Indonesia

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan

##### **a. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan terhadap pertimbangan dalam penentuan pengambilan keputusan di dalam partai politik

##### **b. Bagi Partai Politik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan terhadap pertimbangan dalam penentuan pengambilan keputusan di dalam partai politik

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang nilai-nilai sosial dan pertanggungjawaban yang terkandung dalam Al-Quran mengenai amanah kepemimpinan

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, sebagai referensi terhadap penelitian yang sejenis.